

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Konsep Tentang Pemberdayaan

2.1.1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan individu, organisasi, serta komunitas secara menyeluruh. Menurut Kartasasmita (1995), konsep ini fokus pada peningkatan "kekuatan" atau "kapabilitas" yang ada pada berbagai komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan sosial, pemberdayaan merujuk pada berbagai upaya yang diarahkan untuk mengangkat derajat dan martabat kelompok masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan keterbatasan. Tujuan utama dari proses ini adalah mendukung mereka agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan dan ketertinggalan, sehingga dapat mencapai kemandirian serta memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

2.1.2. Tujuan Pemberdayaan

Suharto (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan untuk menguatkan kedudukan dan kekuasaan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang mengalami ketidakmampuan. Suharto memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Memenuhi Kebutuhan Dasar

Pemberdayaan bertujuan untuk memampukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Ini mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat diharapkan memiliki kebebasan (freedom) dalam artian bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.

2. Menjangkau Sumber-sumber Produktif

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan sumber daya produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan, memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Berpartisipasi dalam Proses Pembangunan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam, perencanaan pembangunan, pelaksanaan program-program pembangunan, pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan evaluasi dan perbaikan kebijakan publik.

4. Meningkatkan Keberdayaan

Suharto (2014) menekankan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, dan mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

5. Menciptakan Perubahan Sosial

Sebagai tujuan akhir, pemberdayaan menurut Suharto mengarah pada terciptanya perubahan sosial yang positif. Ini meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi dan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Dengan demikian, tujuan pemberdayaan menurut Suharto tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Pemberdayaan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

2.1.3. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Najati dkk (2005), terdapat empat prinsip utama yang sering digunakan untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini menekankan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Kesetaraan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah membangun dinamika hubungan yang setara dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Masing-masing pihak saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang berhasil mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Artinya, masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi yang optimal, diperlukan waktu serta proses pendampingan yang melibatkan fasilitator dengan komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip ini mengutamakan penghargaan terhadap kemampuan masyarakat sendiri dibandingkan bergantung pada bantuan dari pihak luar. Dalam konsep ini, masyarakat miskin tidak dilihat sebagai pihak yang sepenuhnya tidak mampu (the have not), melainkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan terbatas (the have little). Masyarakat dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tabungan, memahami dengan baik hambatan-hambatan usaha mereka, mengenal lingkungan tempat tinggalnya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta telah lama mematuhi norma-norma sosial dalam komunitasnya.

4. Prinsip Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat perlu dirancang untuk memiliki keberlanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Secara perlahan, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.1.4. Proses Pemberdayaan

Menurut Sulistyani (2004), proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahap utama:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, masyarakat target pemberdayaan diberi pencerahan untuk menyadari potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Tujuannya adalah membentuk kesadaran dan kepedulian sehingga masyarakat merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan, di mana pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi yang memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

2. Tahap Peningkatan Keterampilan

Tahap ini berfokus pada pemberian wawasan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan dasar. Tujuannya adalah membuka wawasan masyarakat dan memberikan keterampilan dasar sehingga mereka dapat mengambil peran dalam pembangunan. Proses ini melibatkan pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

3. Tahap Peningkatan Kemandirian

Pada tahap final ini, kemampuan intelektual dan keterampilan-keterampilan masyarakat ditingkatkan lebih lanjut. Tujuannya adalah membentuk kemandirian yang ditandai dengan munculnya inisiatif dan kemampuan inovatif masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat secara mandiri melakukan pembangunan dan perbaikan kualitas hidupnya.

Sulistyani (2004) menekankan bahwa proses pemberdayaan ini tidak bersifat selamanya,

melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Setelah mencapai kemandirian, masyarakat tetap perlu dipantau dan dijaga agar tidak mengalami kemunduran lagi. Proses ini bersifat berkesinambungan, di mana masyarakat terus belajar dan meningkatkan kemampuannya dari waktu ke waktu untuk mencapai dan mempertahankan kemandirian.

2.2. Konsep tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM)

2.2.1. Definisi Human Service Organization (HSO)

Human Service Organization (HSO) merupakan suatu entitas yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hasenfeld dan Marriane Woodside (1983),

“Human service organizations are collectives of people organized to protect, maintain, or enhance the personal well-being of individuals by defining, shaping, or altering their personal attributes.” (Hasenfeld dan Marriane Woodside, 1983:1)

Pendapat tersebut menekankan bahwa HSO berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mempengaruhi perkembangan pribadi penerima layanan. Sauber (1983) mempertegas dengan menyatakan bahwa, *“Human service organizations focus on providing services for people.”* (Organisasi pelayanan manusia berfokus pada penyediaan layanan bagi manusia). Selain itu, Jones dan May (1997:89) menguraikan perspektif yang lebih luas: *“Human service organizations contribute not only to meeting the needs and goals of clients but also to the overall social well-being.”* (Organisasi pelayanan manusia berkontribusi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dan tujuan klien, tetapi juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan).

Edi Suharto (2014) menambahkan bahwa HSO dapat dipahami sebagai proses dan strategi

pengelolaan lembaga pelayanan sosial yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial, memberikan kepuasan kepada penerima layanan, dan menciptakan perubahan sosial yang positif.

Dengan demikian, HSO dapat disimpulkan sebagai organisasi yang dirancang secara sistematis untuk memberikan layanan kemanusiaan, melindungi hak-hak individu, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

1. Tujuan *Human Service Organization* (HSO)

Human Service Organization (HSO) merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan definisi dan penjelasan yang saling melengkapi mengenai konsep HSO ini. Hasenfeld (1983) menyatakan bahwa:

"Human service organizations are collections of individuals who come together in an organization for the purpose of protecting, maintaining, or enhancing the well-being of individuals by defining, establishing, altering, or helping to shape personal characteristics." (Hasenfeld, 1983:1)

inti dari *human service organizations* adalah keberadaannya sebagai himpunan individu yang secara kolektif berupaya memengaruhi dan membentuk karakteristik personal demi meningkatkan kesejahteraan individu. Pendapat ini diperkuat oleh Jones dan May (1997) yang mengemukakan bahwa HSO bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan konsumen sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Mereka menyatakan: *"The purpose of human service organizations is to contribute to the fulfillment of client needs and goals, and to the overall social welfare."* (Jones dan May, 1997) (Tujuan organisasi layanan manusia adalah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan klien serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.)

Selain itu, Edi Suharto memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan

menegaskan bahwa HSO berfungsi untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial serta peningkatan kualitas individu, kelompok, dan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Human Service Organizations (HSO)

Esman dan Uphoff (1984) mengklasifikasikan organisasi lokal, termasuk *Human Service Organizations* (HSO), menjadi enam tipe berdasarkan aktivitas utamanya. Mereka menyatakan:

"Local organizations, including human service organizations, can be classified into six types based on their main activities: local administration, local government, membership organizations, cooperatives, service organizations, and private businesses." (Esman dan Uphoff, 1984)

Esman dan Uphoff menyatakan bahwa *local organizations*, termasuk *human service organizations*, memiliki keragaman bentuk yang dapat dikategorikan ke dalam enam tipe utama berdasarkan aktivitas pokoknya. Penjelasan rinci untuk masing-masing tipe tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Local administration* (Administrasi lokal), Organisasi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab kepada atasan birokrasi, bukan kepada masyarakat setempat. Contohnya termasuk kantor-kantor pemerintah daerah yang menjalankan program-program nasional.
- b. *Local government* (Pemerintahan lokal), berbeda dengan administrasi lokal, pemerintahan lokal dipilih atau ditunjuk dan memiliki otoritas untuk menangani tugas-tugas pembangunan dan regulasi. Mereka bertanggung jawab kepada penduduk setempat. Contohnya adalah dewan desa atau panchayat di India.
- c. *Membership organizations* (Organisasi keanggotaan), organisasi ini dibentuk oleh anggota masyarakat untuk menangani berbagai tugas, baik yang bersifat umum maupun spesifik. Contohnya termasuk asosiasi pembangunan desa atau komite pembangunan desa yang

menangani berbagai aspek pembangunan lokal.

- d. *Cooperatives* (Koperasi), koperasi adalah bentuk khusus dari organisasi keanggotaan yang berfokus pada kegiatan ekonomi. Anggotanya bergabung untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan pendapatan mereka. Contohnya termasuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, atau koperasi pemasaran.
- e. *Service organizations* (Organisasi layanan), organisasi ini menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat, seringkali bersifat non-profit. Mereka dapat bekerja dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, atau pengembangan masyarakat. Contohnya termasuk LSM lokal yang menyediakan pelatihan keterampilan atau layanan kesehatan.
- f. *Private businesses* (Bisnis swasta), meskipun termasuk dalam kategori ini, bisnis swasta di tingkat lokal dapat memainkan peran penting dalam pembangunan. Mereka dapat menyediakan lapangan kerja, merangsang ekonomi lokal, dan terkadang terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Konsep Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Kegiatan kelompok masyarakat adalah investasi sosial pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ini sama dengan pelayanan sosial lainnya, di mana masalah kesejahteraan sosial yang dialaminya dapat diselesaikan atau dikendalikan melalui kegiatan yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, Kelompok Pranata Sosial (KPS) dibangun untuk dan dibutuhkan oleh mereka. Kegiatan mereka dapat dilakukan secara informal melalui kebersamaan kelompok sosial, bahkan beberapa di antaranya dapat berkembang menjadi organisasi formal.

Suharto (2019) mengemukakan bahwa Organisasi Sosial Lokal (OSL) merupakan model pelayanan sosial yang mencerminkan program pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengintegrasikan modal sosial, kearifan lokal, dan sistem jaringan pelayanan sosial.

Adi (2018) menyatakan bahwa perkembangan Kelompok Pranata Sosial telah membentuk OSL yang kemudian mewujud menjadi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), yang dapat tumbuh baik dengan dukungan pemerintah maupun secara mandiri.

Kelompok Pranata Sosial (KPS) berperan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial secara swadaya dan sistematis. Kehadiran KPS yang muncul dari kebutuhan masyarakat ini awalnya beroperasi sebagai kelompok informal, namun dalam perkembangannya dapat bertransformasi menjadi organisasi formal yang dikenal sebagai Organisasi Sosial Lokal (OSL). Sejalan dengan dinamika sosial, OSL yang berawal dari KPS kemudian mengambil bentuk Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

4. Definisi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan manifestasi sistem kolaboratif dalam pelayanan sosial yang tumbuh dari akar rumput masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan berbagai usaha kelompok, lembaga, dan jejaring pendukung dalam suatu kerangka kerja sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

WKSBM termasuk dalam kategori Organisasi Sosial Lokal (OSL) yang peran dan eksistensinya mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai OSL, WKSBM merupakan refleksi program kegiatan masyarakat yang mengakses pemberdayaan penduduk lokal dengan mengedepankan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/2004 menggariskan bahwa WKSBM merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi sebagai sistem jejaring sosial di tingkat komunitas. Regulasi ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam penanganan permasalahan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) didefinisikan sebagai sistem kolaborasi antar unit pelayanan sosial di tingkat dasar yang meliputi usaha kelompok, lembaga, dan jaringan pendukungnya.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sebuah sistem kolaboratif dalam pelayanan sosial yang berakar dari masyarakat tingkat akar rumput. Sistem ini diatur secara formal melalui beberapa landasan hukum, yang menetapkan WKSBM sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan sistem jejaring sosial di tingkat komunitas. WKSBM mengintegrasikan berbagai komponen seperti usaha kelompok, lembaga, dan jaringan pendukung dalam suatu kerangka kerja yang sistematis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam penanganan permasalahan sosial. Sistem ini menekankan pentingnya kerjasama antar keberangkatan pelayanan sosial di level akar rumput, yang mencerminkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan sosial secara mandiri dan terorganisir.

5. Tujuan Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM)

Tujuan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan sebagai berikut:

- a. Penguatan Jaringan, secara fundamental, WKSBM bertujuan untuk memperkuat jaringan kerjasama antar kelompok sosial di tingkat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penguatan jaringan ini diwujudkan melalui pengembangan sinergi antar komponen masyarakat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
- b. Peningkatan peran masyarakat, WKSBM memiliki tujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan sosial. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung semangat kebersamaan dan gotong

royong. Melalui pendekatan ini, WKSBM berupaya menciptakan sistem penanganan masalah sosial yang efektif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

- c. Penanganan masalah sosial, yakni mencegah dan menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat lokal melalui pendayagunaan potensi dan sumber daya yang ada secara melembaga.
- d. Ketahanan Sosial, WKSBM bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui optimalisasi potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan. WKSBM tidak hanya fokus pada penanganan masalah yang ada, tetapi juga berorientasi pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Dengan demikian, WKSBM menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat.
- e. Pemberdayaan, WKSBM bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. WKSBM menekankan pentingnya pelestarian dan penguatan nilai-nilai sosial budaya yang positif sebagai modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, WKSBM diharapkan dapat menjadi wahana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

6. Fungsi Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM)

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) memiliki fungsi yang kompleks dan saling terintegrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Fungsi Pelayanan Sosial, Dalam konteks pelayanan sosial, WKSBM menjalankan fungsi strategis sebagai sistem pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial. WKSBM juga berfungsi memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kesejahteraan sosial dan pengembangan nilai-nilai gotong royong.

- b. Fungsi Peremberdayaan, WKSBM memiliki fungsi pemberdayaan yang signifikan dalam pengembangan potensi dan sumber daya lokal. Fungsi ini diwujudkan melalui upaya penggalian dan pendayagunaan nilai-nilai serta pengetahuan lokal secara optimal dan berkelanjutan. Melalui fungsi pemberdayaan, WKSBM berperan dalam menciptakan kemandirian masyarakat dan mengembangkan kapasitas komunitas dalam mengelola sumber daya mereka sendiri.
- c. Fungsi Koordinasi, Sebagai sistem koordinasi, WKSBM berfungsi mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Fungsi koordinasi ini mencakup pengelolaan sumber daya, penghimpunan dan penyaluran dana sosial, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. WKSBM juga berperan dalam membangun dan memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga, serta mengembangkan sinergi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

2.3. Konsep tentang Keluarga Miskin

2.3.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang melampaui sekadar kekurangan materi, melainkan mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun non-pangan. Pengukuran ini didasarkan pada pendekatan basic needs, yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan minimum kalori dan barang/jasa esensial lainnya. Namun, definisi kemiskinan tidak dapat direduksi hanya pada aspek ekonomi semata. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan juga mencakup aspek sosial dan budaya, yaitu kondisi ketika hak-hak dasar warga negara untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tidak terpenuhi. Hak-hak dasar tersebut meliputi akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, perumahan yang sehat, serta jaminan rasa aman dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Yacoub (2012), kemiskinan merupakan isu fundamental yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sekadar persoalan kekurangan materi atau pendapatan, tetapi merupakan masalah yang bersifat multidimensional dan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Artinya, kemiskinan mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kualitas hidup, mulai dari kesehatan, pendidikan, akses terhadap layanan sosial, hingga peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut pandangannya, kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memperoleh akses yang cukup terhadap sumber daya penting untuk menjalani kehidupan yang layak, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

2.3.2. Jenis Kemiskinan

Menurut Ali Khomsan dkk. (2023), kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang penting untuk dipahami. Mereka menjelaskan Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis penting: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural). Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis kemiskinan tersebut:

- a. Kemiskinan absolut, merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kemiskinan relatif, yang muncul akibat ketidakmerataan dalam pembangunan. Meskipun seseorang mungkin memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, mereka masih dapat

dianggap miskin jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata di komunitas mereka.

- c. Kemiskinan kultural, terjadi ketika norma dan nilai budaya menghalangi individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya termasuk sikap apatis, ketidakmauan untuk belajar, dan ketergantungan pada bantuan sosial.
- d. Kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam struktur sosial yang membatasi akses individu terhadap sumber daya. Meskipun sumber daya mungkin tersedia, kelompok tertentu mungkin tidak dapat memanfaatkannya akibat diskriminasi atau kebijakan yang tidak mendukung..

2.3.3. Kriteria Kemiskinan

Menurut Keputusan Menteri Sosial (Kemensos) RI Nomor 262/HUK/2022 tentang Penetapan dan Pendataan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang terdaftar sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki sumber pendapatan dan/atau memiliki sumber pendapatan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis, kecuali di puskesmas atau pusat kesehatan yang disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian setiap tahun untuk semua anggota keluarga.
- e. Memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya hanya sampai tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f. Dinding rumah mungkin terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kondisi buruk atau kualitas rendah, termasuk tembok yang tidak diplester
- g. Lantai mungkin terbuat dari tanah, kayu, semen, keramik, atau keramik dengan kondisi buruk atau kualitas rendah
- h. Atap mungkin terbuat dari ijuk, rumbia, genteng, seng, atau asbes dengan kondisi buruk

atau kualitas rendah.

- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal tanpa meteran listrik atau tanpa listrik.
- j. Luas lantai rumah tidak lebih dari 8 meter persegi per orang.
- k. Mempunyai sumber air minum dari sumur, mata air tak terlindung, sungai, air hujan, atau sumber air lain.

2.3.4. Definisi Keluarga Miskin

Konsep keluarga miskin telah menjadi fokus perhatian berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan. Definisi keluarga miskin memiliki beragam interpretasi yang mencerminkan kompleksitas permasalahan kemiskinan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan definisi yang lebih spesifik, yaitu individu atau keluarga yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memilikinya namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

BKKBN mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggunakan enam indikator untuk mengidentifikasi keluarga miskin, meliputi frekuensi makan, kepemilikan pakaian, kondisi lantai rumah, konsumsi protein, kemampuan membeli pakaian baru, dan luas lantai rumah per penghuni. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) dalam mendefinisikan kemiskinan, dengan fokus pada ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan yang mendasar. BPS juga menetapkan standar kecukupan pangan berdasarkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari.

2.4. Konsep Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang memiliki peran penting dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat. Siporin memandang pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial yang memiliki tujuan membantu individu mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Dalam pandangannya,

pekerjaan sosial tidak hanya sebagai profesi pelayanan kemanusiaan, tetapi juga merupakan institusi sosial dan seni praktis yang didasarkan pada keilmuan dan teknik tertentu.

National Association of Social Workers (NASW, 2017:4) memberikan perspektif yang melengkapi definisi tersebut dengan menekankan pada aspek profesionalitas dalam membantu meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut. NASW menyatakan: "*Social work is a professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to that goal.*" (*National Association of Social Workers*, 2017) (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan tersebut).

Zastrow (2016) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang berfokus pada dua hal utama, yaitu membantu individu, kelompok, maupun komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi sosial, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi tercapainya tujuan tersebut. Peningkatan kapasitas (*enhance*) berarti memperkuat kemampuan yang sudah dimiliki, sedangkan pemulihan kapasitas (*restore*) mengacu pada upaya mengembalikan kemampuan yang menurun akibat hambatan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Fungsi sosial sendiri mencakup kemampuan seseorang atau kelompok untuk menjalankan peran sosialnya secara efektif dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada perubahan individu, tetapi juga melakukan intervensi pada tingkat lingkungan dan struktur sosial, seperti melalui advokasi kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan pengembangan program komunitas. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki orientasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan, di mana individu dan komunitas dapat mandiri serta hidup dalam sistem sosial yang mendukung.

Pincus dan Minahan (2013) memperkaya pemahaman tentang praktik pekerjaan sosial ia menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial merupakan penerapan terpadu dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas dalam meningkatkan fungsi sosial mereka. Pengetahuan yang digunakan meliputi teori-teori sosial, psikologi, kebijakan publik, serta dinamika komunitas, sedangkan keterampilan mencakup kemampuan komunikasi, konseling, mediasi, asesmen kebutuhan, hingga perencanaan dan evaluasi program. Nilai-nilai yang menjadi landasan praktik berakar pada etika profesi, seperti penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan. Praktik ini memiliki jangkauan intervensi yang luas, sejalan dengan prinsip *generalist practice* yang menyesuaikan pendekatan berdasarkan konteks dan kebutuhan klien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan fungsi sosial, yakni kemampuan seseorang atau kelompok menjalankan peran sosialnya secara efektif di berbagai lingkungan. Upaya tersebut dapat berupa memperkuat kapasitas yang ada, memulihkan kemampuan yang terganggu, atau mengatasi hambatan yang membatasi partisipasi sosial. Dengan demikian, praktik pekerjaan sosial tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan pengembangan, serta menuntut integrasi yang seimbang antara teori, keterampilan lapangan, dan komitmen terhadap etika profesi.

Dalam konteks Indonesia, definisi pekerjaan sosial telah dikukuhkan melalui UU No. 14 tahun 2019 yang menegaskan bahwa praktik pekerjaan sosial merupakan pelaksanaan bantuan profesional yang terorganisir, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Bantuan ini bertujuan untuk mencegah masalah sosial serta memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.1. Peran Pekerja Sosial dengan Kemiskinan

Pekerja sosial memiliki beragam peran penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Peran-peran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi satu sama lain

untuk mencapai penyelesaian masalah yang optimal. Berikut adalah peran pekerja sosial dengan kemiskinan:

- a. Sebagai Fasilitator Konseling, pekerja sosial berperan dalam memberikan layanan konsultasi bagi individu yang menghadapi kesulitan ekonomi. Proses ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap akar permasalahan, pengembangan solusi alternatif, dan pemberian arahan yang konstruktif. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki klien untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi.
- b. Sebagai Penggerak Perubahan, dalam kapasitasnya sebagai motivator, pekerja sosial bertugas menumbuhkan semangat dan keyakinan diri klien. Hal ini penting untuk membangun optimisme bahwa setiap permasalahan ekonomi memiliki jalan keluar yang dapat ditemukan bersama.
- c. Sebagai Penghubung, pekerja sosial bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan klien dengan berbagai sumber daya dan layanan sosial yang tersedia. Mereka mengidentifikasi dan memfasilitasi akses terhadap sistem sumber yang dapat membantu penyelesaian masalah ekonomi klien.

Pemberi Dukungan, peran pendampingan mencakup pemberian dukungan menyeluruh, baik dari segi psikologis, sosial, maupun emosional. Hal ini membantu klien merasa didukung dan tidak terisolasi dalam menghadapi kesulitannya.